



Apakah Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Berdampak pada Pengungkapan Laporan Keberlanjutan?

Tri Siwi Nugrahani ^{1,*}
Nurhayati ²

^{1,2} Prodi Akuntansi, Universitas PGRI Yogyakarta

* Korespondensi: trisiwi@upy.ac.id

Abstract: *Companies are required to prepare sustainability reports in conducting business by disclosing economic, social and environmental activities. The company's willingness to disclose sustainability reports to show the company's moral compliance with regulations, care for the environment and society which is currently still interesting to study because disclosure of sustainability reports is still being debated whether it is mandatory or not done by companies. Several factors contributed to this disclosure, such as the board of directors, audit committee and ROA of the 24 companies indexed in SRI-KEHATI during 2017-2021. The results of the study show that institutional ownership and the board of directors affect the disclosure of sustainability reports, but the audit committee does not affect the disclosure of sustainability reports.*

Keywords: *Audit committee; Board of directors; Sustainability report.*

1. Pendahuluan

Setiap perusahaan berupaya menginginkan perolehan laba yang tinggi sebagai ukuran keberhasilan, namun hal itu tidak cukup untuk keberhasilan perusahaan karena perusahaan perlu mempertimbangkan faktor lain tidak hanya dilihat dari keuangan tetapi juga non keuangan, seperti kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan perusahaan untuk memperhatikan kegiatan terkait dengan lingkungan khususnya di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 74 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Republik Indonesia, 2007), namun dulu hanya terbatas pada perusahaan menjalankan bisnis terkait dengan penggunaan sumber daya alam, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.47 Tahun 2012 yang berisi ketentuan perusahaan bersifat wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan yang disebut dengan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dikenalkan oleh Elkington (1997) yang mengemukakan CSR merupakan kegiatan bisnis yang harus memperhatikan keuntungan (*profit*), memenuhi kebutuhan karyawan dan masyarakat (*people*), dan secara aktif mendukung pelestarian lingkungan (*planet*) yang dikenal dengan *triple bottom line* (TBL).

Sidiq *et al.* (2021) dan Nugrahani & Artanto (2022) menjelaskan bahwa perusahaan harus memberikan dukungan penuh dengan menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan kemudian mempresentasikannya kepada pemangku kepentingan dan masyarakat umum melalui

laporan keberlanjutan yang secara legitimasi menjadi kewajiban perusahaan, terlebih sekarang diperkuat dengan ketentuan POJK Nomor 51/03/2017 bahwa perusahaan harus menyusun laporan keberlanjutan yang memuat kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan (OJK, 2017). Untuk mewujudkan tercapainya kepatuhan terhadap regulasi, perusahaan perlu memperhatikan tata kelola yang baik terkait penyusunan laporan keberlanjutan. Tata kelola perusahaan adalah mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar, secara benar sehingga tidak ada pihak yang dirugikan (Setiany *et al.*, 2017). Prinsip tata kelola meliputi: transparansi, akuntabel, responsibilitas, independensi dan keadilan. Tata kelola yang baik memiliki seperangkat dewan direksi, komite audit dan kepemilikan institusional yang membantu jalannya perusahaan yang efisien termasuk dalam pengungkapan laporan keberlanjutan. Oleh karena itu studi ini bertujuan menguji peran tata kelola terhadap penyusunan laporan keberlanjutan. Dewan direksi berperan sebagai pemimpin yang mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan tujuan perusahaan, memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan. Komite audit merupakan organ pendukung yang berada dibawah komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris, karena tujuan komite audit untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dewan dan mengawasi jalannya operasional terkait dengan pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal, sedangkan kepemilikan insitusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (Setiany *et al.*, 2017; Wahidahwati & Ardini, 2021).

Sesuai dengan survei dari *Klynveld Peat Marwick Goerdeler International Limited*, menemukan sejumlah 80% perusahaan sudah mulai memperhatikan kepedulian terhadap sosial dan lingkungan yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan (KPMG, 2020). Tahun 2020, perusahaan yang listing di IDX mengungkapkan laporan keberlanjutan yaitu sejumlah 135 perusahaan, meningkat dari tahun sebelumnya hanya 54 perusahaan (Ramadhani, 2021). Pemerhati dan pemeringkat lingkungan yaitu Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (SRI_KEHATI) mengeluarkan penilaian dengan indeks saham yang berfokus pada standar lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik (ESG) dan memiliki konsep investasi yang bertanggung jawab berkelanjutan. Apabila perusahaan terindeks dalam SRI-KEHATI berarti perusahaan dianggap berhasil dalam mematuhi peraturan tentang tanggung jawab ekonomi, sosial dan lingkungan (Targanski & Murhadi, 2021).

Namun, kenyataannya tidak semua perusahaan menyusun laporan keberlanjutan, sehingga perusahaan mengalami distorsi secara legalitas karena tidak patuh pada tanggung jawab ekonomi, sosial dan lingkungan khususnya di Indonesia seperti yang terjadi pada PT Ultra Jaya Milk Tbk pada tahun 2017 gagal mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan belum melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Hasanah *et al.*, 2017). Selain itu PT PP London Sumatra Indonesia pada tahun 2022 harus mengadakan perjanjian kemitraan inti-plasma untuk perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat adat desa Tebing Tinggi (Nugrahani & Handono, 2023). Kasus ketidakpatuhan ini menunjukkan perusahaan perlu melakukan perbaikan terhadap pengelolaan yang nantinya akan terlihat dalam penyusunan laporan keberlanjutan, karena secara tidak langsung telah memperhatikan sistem manajemen risiko, pengendalian internal dengan

mematuhi ketentuan sistem manajemen yang efektif dan bertanggung jawab terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial (KNKG, 2021).

Studi ini menggunakan pendekatan legitimasi karena terkait dengan kepatuhan perusahaan (Deegan, 2019) yang tentunya tidak lepas dari tata kelola yang ikut berperan dalam mematuhi penyusunan laporan keberlanjutan. Teori legitimasi menjelaskan perusahaan menyesuaikan keadaan dengan peraturan yang berlaku (Fernandez-Feijoo *et al.*, 2014). Studi dahulu yang menguji tata kelola perusahaan dan pengungkapan SR telah dilakukan baik di domestik maupun internasional. Studi dahulu terkait tata kelola dari dewan direksi (Krisyadi & Elleen, 2020; Mahmood *et al.*, 2018; Novitasari *et al.*, 2021; Putri & Pramudiati, 2019; Sinaga & Fachrurizie, 2017; Sofa & Respati, 2020) yang menunjukkan dewan direksi memengaruhi laporan keberlanjutan. Studi dahulu yang menguji laporan keberlanjutan terkait dengan komite audit juga sudah dilakukan Aniktia & Khafid (2015); Saputri *et al.* (2022); Wulandari *et al.* (2021) dengan hasil komite audit dapat meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan. Demikian pula studi tentang kepemilikan institusional yang dilakukan Dewi & Pitriasari (2019); Maria & Sinaga, (2021) yang menunjukkan memengaruhi laporan keberlanjutan. Sulistyawati & Qadriatin, (2018) serta Sidiq *et al.* (2021) menguji tata kelola perusahaan dengan menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu mekanisme khususnya kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan. Perbedaan temuan penelitian menunjukkan masih terjadi ketidak konsistenan hasil, maka studi ini menguji kembali tata kelola perusahaan dan dampaknya pada pengungkapan laporan keberlanjutan yang tidak pernah diuji sebelumnya pada perusahaan yang terindex di SRI KEHATI?

2. Tinjauan Literatur

2.1. Dewan Direksi dan Teori legitimasi

Menurut Deegan, (2019) perusahaan perlu memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi, selain itu perusahaan harus memperhatikan norma lingkungan dan masyarakat supaya kegiatan perusahaan dapat diakui dan dianggap sah oleh pihak lain (Rajesh, 2020). Ketentuan atau regulasi seperti pengungkapan laporan keberlanjutan/*Sustainability Report* (SR) memuat informasi dari kegiatan yang terkait dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan termasuk dalam praktik dari penerapan legitimasi. Dewan direksi memiliki peran penting untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan bisnisnya sesuai dengan etika dan norma sosial yang diakui (Taco & Ilat, 2019). Dewan direksi mampu memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan (Krisyadi & Elleen, 2020; Mahmood *et al.*, 2018; Novitasari *et al.*, 2021; Putri & Pramudiati, 2019; Sinaga & Fachrurizie, 2017; Sofa & Respati, 2020). Studi yang lain juga menunjukkan hasil yang sama bahwa dewan direksi meningkatkan pengungkapan laporan non keuangan termasuk CSR dan SR (Handajani, *et al.*, 2014). Dalam mengemukakan laporan keberlanjutan, perusahaan perlu mengoptimalkan peran dewan direksi yang akan menambah keyakinan dalam menyusun laporan keberlanjutan sehingga mendapatkan kredibilitas dari pemangku kepentingan, maka penrumusan hipotesis 1 sebagai berikut.

H₁: Dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

2.2. Komite Audit dan Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Komite audit adalah bagian dari tata kelola yang bertugas untuk memastikan apakah laporan keberlanjutan yang disusun perusahaan sudah sesuai ketentuan atau belum, dengan digunakan sebagai jaminan laporan keberlanjutan (Adaui, 2020). Komite audit tentunya menjunjung integritas dalam menyusun laporan keuangan dan keberlanjutan (Wulandari et al., 2021). Komite audit memiliki kewajiban untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan perusahaan (Oktaviani & Amanah, 2019; Safitri & Saifudin, 2019). Beberapa studi komite audit terkait dengan laporan keberlanjutan sudah dilakukan, seperti studi Madi et al. (2014); Aniktia & Khafid (2015); Saputri et al. (2022) dan Wulandari et al. (2021) menemukan bahwa komite audit dan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan termasuk pula dalam meningkatkan kepercayaan perusahaan dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan (Ramdani, et al., 2019). Studi yang sama juga diuji oleh Setiawan & Pranaditya, (2018); Setiawan & Ridaryanto (2022) dengan hasil komite audit memengaruhi laporan keberlanjutan, namun tidak signifikan. Berdasar penjelasan diatas, terkait komite audit yang tidak selalu signifikan, maka pengajuan hipotesis 2 yaitu:

H2: Komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

2.3. Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Tata kelola perusahaan salah satunya dapat diawasi dari banyaknya kepemilikan saham institusional secara optimal (Sulistorini & Lestari, 2022). Kepemilikan saham institusional adalah banyaknya saham yang dimiliki secara institusional. Beberapa studi sebelumnya telah menguji kepemilikan saham institusional yang memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan (Situmorang & Hadiprajitno, 2016; Utomo, 2021) dengan hasil bahwa perusahaan akan memperoleh legitimasi dalam menyusun laporan keberlanjutan jika memiliki saham institusional yang besar karena dapat meningkatkan kepercayaan dalam pengungkapan laporan keberlanjutan, maka hipotesis ketiga yaitu:

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel 24 perusahaan yang terindeks SRIKEHATI selama 6 tahun tahun 2017-2020, sehingga total pengamatan 120 perusahaan. Teknik pengambilan sampel secara *purposive*, dan analisa data dengan menggunakan regresi multivariat. Adapun penentuan sampel ditunjukkan pada tabel 1 dan pengukuran variabel dijelaskan dalam tabel 2.

Tabel 1. Penentuan Sampel

No.	Keterangan	Total
1.	Perusahaan yang terdaftar di IDX in 2017-2022	864
2.	Perusahaan yang tidak termasuk indkes SRI - KEHATI selama tahun 2017-2022	(564)
3.	Perusahaan tidak menyusun laporan keberlanjutan (Sustainability Report and Annual Report 2017-2022	(180)
3.	Total Data perusahaan sebagai sampel selama 6 tahun	120

Table 2. Variabel Penelitian

Variabel	Measurement	Refensi
Pengungkapan Laporan Keberlanjutan : Laporan yang kegiatan tentang ekonomi, sosial, dan lingkungan (GRI, 2015)	$SR = \frac{\sum \text{Iten yang dungkapkan}}{\sum \text{Seluruh ketentuan pengungkapan SR}}$	GRI (2015); Rudyanto & Siregar (2018)
Dewan Direksi sebagai salah satu unsur tata kelola perusahaan yaitu dengan kepemilikan dewan direksi (Setiany, et al., 2017).	$BD = \sum \text{Jumlah anggota dewan Direksi}$	Situmorang & Hadiprajitno (2016)
Komite Audit yaitu salah satu unsur tata kelola perusahaan yang dapat digunakan untuk mengawasi jalannya perusahaan ditandai dengan kepemilikan komite audit	$AC = \sum \text{Ajumlah anggota komite audit}$	Josua & Septiani (2020)
Kepemilikan saham institusional yaitu salah satu unsur tata kelola perusahaan berupa kepemilikan saham perusahaan	$IO = \frac{\text{Jml saham kepemilikan institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$	Nurrahman & Sudarno (2018)
Profitability (variabel control)	$ROA = \frac{\text{Net profit}}{\text{Total assets}}$	Jannah (2016)

4. Hasil Penelitian

Studi ini menguji mekanisme tata kelola perusahaan yang berdampak pada pengungkapan laporan keberlanjutan dengan yang dipengaruhi dari tata kelola perusahaan dari dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan saham institusional dengan menggunakan pendekatan teori legitimasi. Berdasar hasil analisis data menunjukkan terdapat 120 perusahaan yang terdaftar di IDX, sedangkan rata-rata dari dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan saham institusional yang termasuk dalam indeks saham SRI KEHATI, disajikan dalam Tabel 4.1. sebagai berikut.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Mak	Rata-rata	St. Deviasi
Dewan direksi	120	4	13	7.78	2.632
Komite Audit	120	2	8	3.93	1.278
Kepemilikan institusional	120	0,34	1	0,65	0,189
Profitabilitas	120	-0,30	0,36	0,09	0,059
Pengungkapan Laporan Keberlanjutan	120	0,31	0,68	0,49	0,089

Tabel 4.1 menunjukkan dewan direksi yang terendah 4 orang yaitu PT. Gas Negara Tbk bergerak pada sektor industri dasar, dan tertinggi yaitu 13 orang pada PT. Dharma Satya Nusantara Tbk bidang agrikultur. Sampel menunjukkan jumlah komite audit terendah 2 orang yaitu PT. AKRA, dan tertinggi 8 orang pada PT. Bank Mandiri Tbk. Berdasar kepemilikan saham institusional menunjukkan terendah sebesar 34% yaitu PT. BBRI sedangkan tertinggi 100% yaitu PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk, dan rata-rata kepemilikan saham institusional sebesar 65%. Tabel 4.1 menunjukkan variabel kontrol berupa Profitabilitas dengan nilai minimal -30% yang diukur dengan ROA yaitu PT. Timah. Tbk sektor material dasar, dan tertinggi sebesar 35% yaitu PT. Unilever sektor industri barang. Tabel 4.1 menunjukkan rata-rata kepatuhan menyusun laporan keberlanjutan sebesar 49% pada perusahaan yang terindeks SRI KEHATI dengan menginformasikan kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Paling tinggi pengungkapan laporan keberlanjutan sebesar

68,13% yaitu PT. Waskita Karya yang bergerak dalam sektor properti dan konstruksi. Berdasar analisis data dapat ditunjukkan Tabel 4. dalam uji hipotesis sebagai berikut:

Tabel 4. Pengujian Hipotesis

Model	Beta	t	Sig.	Hasil
Konstanta	0,303	6,461	0,000***	
Dewan direksi (X1)	0,008	2,647	0,009***	H ₁ = Didukung
Komite Audit(X2)	0,005	0,824	0,412	H ₂ = Tidak didukung
Kepemilikan institusional (X3)	0,101	2,417	0,017**	H ₃ = Didukung
Profitabilitas (K)	0,396	2,987	0,003***	
F hitung : 5,006 (0,000); R ² =-0,397		5,006	0,000***	

*Sig < 5%; ** sig<10%, sig ***<1%

Berdasarkan tabel 4 dari pengujian hipotesis pertama menunjukkan dewan direksi memiliki nilai t (signifikansi) sebesar 2,647 (0,009). Hal ini berarti keberadaan dewan direksi pada perusahaan yang terindeks SRI-KEHATI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, yang berarti H₁ terdukung. Perusahaan yang terindeks SRI KEHATI telah menjalankan tata kelola yang baik dengan mengoptimalkan peran dari dewan direksi untuk mendukung program pemerintah dalam menyusun laporan berkelanjutan. Perusahaan yang terindeks SRI KEHATI telah memperhatikan tata kelola dan legalitas dengan mendukung penyusunan laporan berkelanjutan (Krisyadi & Elleen, 2020; Mahmood *et al.*, 2018; Novitasari *et al.*, 2021; Putri & Pramudiati, 2019; Sinaga & Fachrurrozie, 2017; Sofa & Respati, 2020).

Hasil pengujian hipotesis kedua, menunjukkan nilai t (signifikansi) komite audit sebesar 0,824 (0,412) yang berarti komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan berarti hipotesis 2 tidak didukung. Hasil studi menunjukkan komite audit pada perusahaan yang terdaftar di IDX dan terindeks SRI KEHATI memiliki komite audit yang tidak mampu menjamin meningkatkan laporan keberlanjutan. Komite audit tidak berperan dapat mengoptimalkan tata kelola perusahaan sehingga peran komite audit tidak memengaruhi penyusunan laporan keberlanjutan, karena komite audit lebih fokus pada pemantauan dan pengendalian kegiatan dan informasi yang berkaitan dengan keuangan saja dan tidak menjamin laporan keberlanjutan (Dewi & Pitriasari, 2019; Maria & Sinaga, 2021; Sulistyawati & Qadriatin, 2018).

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan nilai t (signifikansi) kepemilikan institusional sebesar 2,417 (0,017) yang berarti kepemilikan saham institusional perusahaan yang terindeks SRI_KEHATI berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan berarti hipotesis 3 didukung. Kepemilikan saham institusional yang tinggi dapat meningkatkan pengungkapan informasi baik keuangan maupun non-keuangan (Situmorang & Hadiprajitno (2016). Sesuai dengan studi Utomo (2021) yang mengemukakan kepemilikan saham institusional berdasarkan teori legitimasi dapat mendorong perusahaan memenuhi tuntutan pemangku kepentingan termasuk pemegang saham untuk memaksimalkan citra perusahaan dan menjamin keberlanjutan perusahaan.

5. Kesimpulan

Studi ini membuktikan bahwa dengan pendekatan teori legitimasi dapat menjelaskan pengungkapan laporan keberlanjutan yang ditentukan dari dewan direksi, komite audit dan kepemilikan saham institusional, serta ROA sebagai pengendali. Perusahaan sudah memperhatikan penyusunan laporan keberlanjutan dengan indeks GRI, yang menginformasikan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan sampel yang hanya pada perusahaan yang terindeks SRI – KEHATI, sehingga data terbatas. Studi mendatang dapat diuji dengan menggunakan data berdasar ketentuan lain seperti perusahaan yang terdaftar dalam ASRAT apakah hasil konsisten atau tidak. Selain itu pengujian laporan keberlanjutan dapat mempertimbangkan kepentingan dari *stakeholder* (Anna & Dwi, 2019).

Daftar Pustaka

- Adaui, C. R. L. (2020). Sustainability reporting quality of Peruvian listed companies and the impact of regulatory requirements of sustainability disclosures. *Sustainability* (Switzerland), 12(3). <https://doi.org/10.3390/su12031135>
- Aniktia, & Khafid. (2015). Pengaruh mekanisme good corporate governance dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan sustainability report. *Accounting Analysis Journal*, 4(3), 1–10. <https://doi.org/10.15294/aaj.v4i3.8303>
- Anna, Y. D., & Dwi, D. R. (2019). Sustainability reporting: Analisis kinerja keuangan dan nilai perusahaan. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(2), 238–255. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i2.18804>
- Deegan, C. M. (2019). Legitimacy theory: Despite its enduring popularity and contribution, time is right for a necessary makeover. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 32(8), 2307–2329. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2018-3638>
- Dewi, & Pitriasari. (2019). Pengaruh good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sustainability report. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 11(1), 33–53. <https://doi.org/10.37151/jsma.v11i1.13>
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone.
- Fernandez-Feijoo, B., Romero, S., & Ruiz, S. (2014). Effect of stakeholders' pressure on transparency of sustainability reports within the GRI framework. *Journal of Business Ethics*, 122(1), 53–63. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1748-5>
- GRI. (2015). *Interpretations on the G4 Guidelines, issued by the Global Sustainability Standards Board, are located at the end of this document, and are to be considered by all users*. Retrieved from <https://www.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx>
- Handajani, L., Subroto, B., T, S., & Saraswati, E. (2014). Does board diversity matter on corporate social disclosure? An Indonesian evidence. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(9), 8–16. Retrieved from <https://iiste.org/Journals/index.php/CEIS/article/view/12131>
- Hasanah, Syam, & Jati. (2017). Pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan sustainability report pada perusahaan di Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 711–720. <https://doi.org/10.22219/jrak.v5i1.4992>
- Jannah. (2016). Pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan sustainability report pada perusahaan di BEI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5, 1–15.

- Josua, & Septiani. (2020). Analisis pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan (Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar pada BEI tahun 2015-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(3), 1–9.
- KNKG. (2021). Pedoman umum governansi korporat Indonesia (pp. 1–50). pp. 1–50.
- KPMG. (2020). Survei Pelaporan Keberlanjutan KPMG 2020.
- Krisyadi, R., & Elleen, E. (2020). Analisis pengaruh karakteristik perusahaan dan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan sustainability report. *Global Financial Accounting Journal*, 4(1), 16. <https://doi.org/10.37253/gfa.v4i1.753>
- Madi, H. K., Ishak, Z., & Manaf, N. A. A. (2014). The impact of audit committee characteristics on corporate voluntary disclosure. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 486–492. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2014.11.106>
- Mahmood, Kouser, Ali, Ahmad, & Salman. (2018). Does corporate governance affect sustainability disclosure? A mixed methods study. *Sustainability (Switzerland)*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.3390/su10010207>
- Maria, A., & Sinaga, S. (2021). Penentuan pengungkapan sustainability report dengan GRI standar pada Sektor Non-Keuangan. *GEMA: Jurnal Gentiara Manajemen Dan Akuntansi*, 13(1), 23–35. <https://doi.org/10.47768/gema.v13i1.225>
- Novitasari, Putra, & Saebani. (2021). Pergantian dewan komisaris dan dewan direksi terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pendahuluan. *WAHANA: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 24(1), 60–78. <https://doi.org/10.35591/wahana.v24i1.262>
- Nugrahani, T. S., & Artanto, D. A. (2022). Sustainability reporting by disclosing economic, social and environmental performance. *Studies in Business and Economics*, 17(2), 216–226. <https://doi.org/10.2478/sbe-2022-0034>
- Nugrahani, T. S., & Handono, W. D. (2023). Determinants of firm value: The role of environmental management disclosure practices. *Proceeding International Conference on Accounting and Finance*, 1(32), 230–240. <https://doi.org/10.20885/InCAF.vol1.art26>
- OJK. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Republik Indonesia.
- Oktaviani, & Amanah. (2019). Pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan, struktur modal dan corporate governance terhadap publikasi sustainability report. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(8), 1–10.
- Putri, A. Z., & Pramudiati, N. (2019). Determinan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sustainability report. *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 188–198.
- Rajesh, R. (2020). Exploring the sustainability performances of firms using environmental, social, and governance score. *Journal of Cleaner Production*, 1–49. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119600>
- Ramadhani. (2021). Emiten Wajib Sampaikan Laporan Berkelanjutan.
- Ramdani, R., Hapsari, D. W., & Zultilisna, D. (2019). The effect of firm size, profitability, independent commissioner, public ownership and, audit committee meeting frequency on sustainability report (Study of non-financial companies that listed on the Indonesia Stock Exchange Period 2014–2018). *E-Proceeding of Management*, 6(3), 5825–5832.
- Republic Indonesia. (2012). Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Republic Indonesia.
- Rudyanto, A., & Siregar, S. V. (2018). The effect of stakeholder pressure and corporate governance on the sustainability report quality. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(2), 233–249. <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2017-0071>

- Safitri, & Saifudin. (2019). Implikasi karakteristik perusahaan dan good corporate governance terhadap pengungkapan sustainability report. *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 4(1), 13–25.
- Saputri, S., Syafitri, Y., & Ardiany. (2022). Pengaruh komite audit dan ukuran perusahaan terhadap sustainability report. *Pareso Jurnal*, 4(1), 239–252.
- Setiany, E., Suhardjanto, D., Lukviarman, N., & Hartoko, S. (2017). Board independence, voluntary disclosure, and the cost of equity capital. *Review of Integrative Business & Economics Research*, 6(4), 389–399.
- Setiawan, E. M., & Ridaryanto, P. (2022). Analisis pengaruh efektifitas dewan komisaris dan komite audit terhadap kualitas sustainability report. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 19(1), 126–149. <https://doi.org/10.25170/balance.v19i1.3510>
- Setiawan, W., Hasiholan., & Pranaditya, A. (2018). Pengaruh kinerja lingkungan, biaya lingkungan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan dengan corporate social responsibility (CSR) sebagai variabel intervening (Studi Kasus Perusahaan Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Journal Of Accounting*, 8(1), 1–12.
- Setyawan, Yuliandari, & Aminah. (2018). Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap pengungkapan sustainability report. *E-Proceeding of Management*, 8(1), 622–633.
- Sidiq, Surbakti, & Sari. (2021). Pengungkapan sustainability report: Konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan institusional. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 78–88. <https://doi.org/10.21632/saki.4.2.78-88>
- Sinaga, & Fachrurizie. (2017). The effect of profitability, activity analysis, industrial type and good corporate governance mechanism on the disclosure of sustainability report. *Accounting Analysis Journal*, 6(3), 347–358. <https://doi.org/10.15294/aaj.v6i3.18690>
- Situmorang, & Hadiprajitno. (2016). Pengaruh karakteristik dewan dan struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan sustainability reporting. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–14.
- Sofa, F. N & Respati, N. W. (2020). Pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sustainability report (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017). *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 32-49.
- Sulistiorini, J., & Lestari, D. (2022). Pengaruh profitabilitas, struktur modal, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan terkonsentrasi terhadap nilai perusahaan consumer goods. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi*, 9(1), 40–53. <https://doi.org/10.53008/kalbisocio.v9i1.206>
- Sulistyawati, & Qadriatin. (2018). Praktek pengungkapan sustainability report dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Journal Competency of Business*, 3(1), 51–64. <https://doi.org/10.47200/jcob.v3i1.669>
- Taco, C. & Ilat, V. (2019). Pengaruh earning power, komisaris independen, dewan direksi, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA*, 4(4), 873–884. <https://doi.org/10.35794/emba.4.4.2016.14514>
- Targanski, K. P. T., & Murhadi, W. R. (2021). Sustainable and responsible investment in Indonesia and Malaysia: an event study on SRI-KEHATI and FTSE4GBM Indices. *Jurnal Siasat Bisnis*, 25(1), 69–78. <https://doi.org/10.20885/JSB.VOL25.ISS1.ART6>

- Undang-Undang Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Republik Indonesia.
- Utomo. (2021). Moderasi kinerja keuangan pada pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan sustainability report di Indeks Sri Kehati tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 9(2), 1–12. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v9n2.p%25p>
- Wahidahwati, W., & Ardini, L. (2021). Corporate governance and environmental performance: How they affect firm value. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), 0953–0962. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0953>
- Wulandari, R., Fauziyah, W., & Mubarak. (2021). Pengaruh komite audit dan struktur modal terhadap pengungkapan sustainability report. *Jurnal of Accounting and Finance*, 6(02), 181–193. <https://doi.org/10.35706/acc.v6i02.5616>